



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang pemerintahan yang baik.

Pematangsiantar, Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR



JUNAEDI A. SITANGGANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	1
1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja	4
2.2 Indikator Kinerja Utama	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	13
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	13
3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir	15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional	17
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional	17
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	18
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	26
3.2 Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Penjelasan Umum Organisasi

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, yang mana Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar terdiri atas :

- A.** Sekretaris Daerah
- B.** Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1. Bagian Pemerintahan
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Bagian Hukum
- C.** Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3. Bagian Pengadaan barang dan Jasa
- D.** Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 - 1. Bagian Umum
 - 2. Bagian Organisasi
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing. Para Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu :

1. Responsibilitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga lainnya.;
3. Pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan;
4. Penentuan batas wilayah kabupaten/kota;
5. Sarana dan prasarana pada beberapa unit kerja bagian;
6. Kualitas penyusunan produk hukum, pelayanan kasus hukum dan penyebarluasan produk hukum daerah;
7. Kompetensi SDM pada beberapa unit kerja bagian;
8. Informasi tentang terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Analisis Kelembagaan, Anjab, ABK, Pengelola data Ketatalaksanaan yang bersifat dinamis;
9. Pengelolaan dan pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;
10. Tata kelola surat-menyurat dan pengelolaan aset.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja ini maka terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	B
		Nilai LPPD	Tinggi
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80 (baik)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86
		Inovasi perangkat daerah	1 inovasi

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 32.613.222.361
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 10.883.987.543
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.858.498.925
TOTAL		Rp 45.355.708.829

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar telah menetapkan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada ketiga program di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan sasaran dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah untuk tahun 2024.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2027, sesuai dengan tabel di bawah ini :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN CAPAIAN IKU
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada penilaian SAKIP	Penilaian Kemenpan RB Nomor 88 Tahun 2021
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi penyusunan dokumen PK dan LAKIP dibagi jumlah perangkat daerah di Kota Pematangsiantar dikali 100 %
		Persentase kelurahan beradministrasi baik	Jumlah kelurahan beradministrasi baik dibagi jumlah kelurahan se- kota Pematangsiantar dikali 100%
		Penyampaian LPPD yang tepat waktu	Waktu penyampaian LPPD ke Pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
		Penyampaian LKPJ yang tepat waktu	Waktu penyampaian LKPJ dalam sidang Paripurna paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
		Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu	Waktu penyampaian laporan SPM ke Pemerintah atasan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
		Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun	Jumlah pilar batas wilayah yang sudah dibangun dibagi jumlah pilar batas wilayah yang sudah ditetapkan dikali 100 %

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditayangkan di RUP	Jumlah seluruh realisasi pengadaan barang dan jasa dibagi jumlah pagu pengadaan barang dan jasa yang terdaftar di RUP dikali 100 %
		Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa	40 % tingkat komponen produksi dalam negeri dari jumlah seluruh pengadaan barang dan jasa (Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021) dikali 100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi pada penilaian pelayanan publik	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan fasilitasi pelayanan public dibagi jumlah perangkat daerah di Kota Pematangsiantar dikali 100 %
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibagi jumlah perangkat daerah yang ada di Kota Pematangsiantar dikali 100%
		Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan naskah dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah perangkat daerah yang naskah dinas sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku dibagi jumlah perangkat daerah di Kota Pematangsiantar dikali 100%
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk sesuai dengan perundang- undangan dibagi jumlah perangkat daerah Kota Pematangsiantar dikali 100%
		Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan	Jumlah perangkat daerah yang memiliki dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan dibagi jumlah perangkat daerah di Kota Pematangsiantar dikali 100%

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan evaluasi jabatan	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan evaluasi jabatan dibagi jumlah perangkat daerah Kota Pematangsiantar dikali 100%
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang diselesaikan	Jumlah realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang ditargetkan dikali 100 %
	Persentase administrasi keuangan yang dilayani	Jumlah orang yang menerima gaji, tunjangan ASN dan jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang direalisasikan dibagi dengan jumlah yang ditargetkan dikali 100 %
	Persentase orang yang mendapat pemahaman hukum	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan dibandingkan dengan target pegawai yang akan diberi sosialisasi peraturan perundang- undangan dikali 100 %
	Persentase kerjasama yang terfasilitasi	Jumlah kerjasama yang terfasilitasi dibagi jumlah permohonan rencana kerjasama dikali 100%
	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang disediakan	Jumlah realisasi sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum yang telah dilaksanakan dibagi jumlah sub kegiatan pada kegiatan administrasi umum

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

			yang seharusnya dilaksanakan dikali 100 %
		Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana yang dilayani	Jumlah barang yang tersedia dibagi rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dikali 100 %
		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar	Jumlah pembayaran gaji THL, pembayaran Air, Listrik, Telepon dan Belanja Sewa dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan dikali 100%
		Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana	Jumlah barang yang terpelihara dibagi rencana jumlah barang milik daerah (RKBMD) dikali 100 %
		Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan, jumlah orang yang mengikuti medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah yang terlaksana dibagi dengan jumlah sub kegiatan yang ditargetkan pada administrasi keuangan dan operasioanal kepala daerah dan wakil kepala daerah dikali 100 %

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah realisasi kegiatan keagamaan dan kemasyarkatan yang difasiitasi dibagi jumlah realisasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan selama 1 (satu) tahun dikali 100 %
	Persentase fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Jumlah realisasi fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana dibagi target fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat dikali 100%
	Persentase fasilitasi penyusunan produk hukum yang terealisasi	Jumlah produk hukum daerah yang disusun dibandingkan dengan target penyusunan produk hukum dalam 1 tahun dikali 100 %
	Persentase fasilitasi bantuan hukum yang terealisasi	Jumlah kasus hukum yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum dibandingkan dengan target kasus yang difasilitasi dalam 1 tahun dikali 100 %
	Persentase pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang terealisasi	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan dan pengelolaan informasi hukum dan 1 tahun dikali 100 %
	Persentase kerja sama yang terfasilitasi	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi dibagi jumlah permohonan rencana Kerjasama dikali 100 %
	Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana	Jumlah realisasi kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi dengan jumlah kebijakan perekonomian yang ditargetkan dikali 100%

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

		Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah dan secretariat daerah yang tersedia dibagi dengan jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah, wakil kepala daerah dan secretariat daerah yang dibutuhkan dikali 100%
		Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan KDH/WKDH	Jumlah kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang difasilitasi dibagi kegiatan keprotokolan KDH/WKDH yang direncanakan selama satu tahun dikali 100%
		Persentase fasilitasi kegiatan komunikasi KDH/WKDH	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dikomunikasikan dibagi kegiatan KDH/WKDH yang direncanakan selama satu tahun dikali 100%
		Persentase fasilitasi kegiatan dokumentasi tugas KDH/WKDH	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang didokumentasikan dibagi kegiatan KDH/WKDH yang direncanakan selama satu tahun dikali 100%
		Persentase kegiatan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana	Kebijakan sumber daya alam yang dikoordinasikan dan dievaluasi dikali 100 %
		Persentase SKPD yang menyampaikan laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan monitoring evaluasi (Monev) laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah SKPD yang ada di Kota Pematang Siantar di kali 100%
		Persentase SKPD yang melaporkan progress kegiatan fisik tepat waktu	Jumlah SKPD yang melaporkan kegiatan fisiknya tepat waktu dibagi jumlah SKPD penyelenggara kegiatan fisik dikali100%

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka diperlukan :

1. Peningkatan pelaporan kinerja yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
3. Penataan standar administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
4. Peningkatan pengetahuan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Menyempurnakan regulasi dibidang pelayanan publik, kelembagaan, Anjab, ABK dan Ketatalaksanaan.
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Peningkatan kualitas administrasi di kecamatan dan kelurahan;
8. Peningkatan pengetahuan SDM Apartur yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
9. Peningkatan kemampuan ASN dalam penyusunan rancangan produk hukum;
10. Pelayanan administrasi persuratan berbasis elektronik;
11. Peningkatan monitoring dan evaluasi pertumbuhan ekonomi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan kota yang lebih terukur, objektif dan terintegrasi.

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berikut pencapaian sasaran strategis pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan tabel di bawah ini :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B
	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	B	B
	Nilai LPPD	Tinggi	Belum Rilis
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80 (baik)	77,01 (baik)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
	Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 inovasi

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

Berdasarkan tabel di atas maka capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah 64,5 dengan kategori “ B”, hal ini menunjukkan bahwa capaian memenuhi target dimana targetnya sebesar “58” dengan kategori CC maka bisa disimpulkan bahwa target tercapai sebesar 100%.

2. Capaian Kinerja Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kota Pematangsiantar tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai sebesar 60,84 dengan predikat “B”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja “ Baik”, dan dapat disimpulkan bahwa target capaian tercapai sebesar 100%.

3. Capaian Kinerja Nilai LPPD

Untuk tahun 2024, hasil LPPD Pemerintah Kota Pematangsiantar belum rilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga belum dapat dibandingkan hasil realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

4. Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pematangsiantar tahun 2024 mendapatkan total nilai pembobotan berjumlah “77,01” dengan predikat baik. Dimana target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar “80” dengan predikat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target capaian belum tercapai sebesar 100% karena tidak mengalami kenaikan bobot nilai, walupun dengan predikat yang sama yaitu baik.

5. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Pematangsiantar tahun 2024 mendapatkan total nilai pembobotan sebesar “89,1” dengan predikat “Baik”. Dimana target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar “86” dengan predikat “Baik”. Penilaian ini

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

diambil dari data masing- masing OPD yang melaporkan langsung ke Bagian Organisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa target capaian tercapai sebesar 100%.

6. Capaian Inovasi Perangkat Daerah

“Tangan Rose” merupakan inovasi Sekretariat Daerah pada Tahun 2024, dimana target pada tahun 2024 bahwa inovasi perangkat daerah berjumlah 1 (satu) inovasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target capaian tercapai sebesar 100%.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari Renstra 2022-2027, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2024 sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu
Dan Beberapa tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B (64,5)	CC (54, 82)	C (45,63)	C (42,39)
2.	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	B	B (60,41)	CC (55,32)	CC (50,18)	C (40,57)
3.	Nilai LPPD	Tinggi	Belum Rilis	Belum Rilis	Rendah (2,0321)	N/A
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80 (baik)	77,01 (baik)	61,86	68,00	43,74
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B (84,75)	B (81,91)	N/A
6.	Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 inovasi	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 adalah 64,5 dengan kategori “B”. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sudah mengalami kenaikan secara signifikan, yang mana pada tahun 2023 mendapatkan bobot 54,82 dan tahun 2022 dengan bobot 45,63.

2. Capaian Kinerja Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kota Pematangsiantar tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai sebesar 60,41 dengan predikat “B”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja “ Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan nilai 55,32 dengan predikat “C” dan pada tahun 2022 dengan nilai “50,18” dengan predikat “ CC” dapat dilihat bahwa nilai AKIP mengalami kenaikan yang signifikan.

3. Capaian Kinerja Nilai LPPD

Pada tahun 2024, hasil nilai LPPD Pemerintah Kota Pematangsiantar belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, begitu juga dengan tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2022, LPPD Kota Pematangsiantar memperoleh skor “2,0321” dengan status “Rendah”. Rendahnya nilai LPPD tersebut disebabkan oleh capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD yang masih rendah

4. Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pematangsiantar tahun 2024 mendapatkan total nilai pembobotan berjumlah “ 77,01 ” dibandingkan dengan tahun 2023 dengan bobot jumlah “ 61,86” , dimana ini mengalami kenaikan yang signifikan.

5. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat diakumulasikan dari data OPD yang melaporkan langsung ke Bagian Organisasi tahun 2024 didapat nilai "89,1" dan ini telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dengan nilai "84,75" dan ini telah mencapai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bernilai baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional

N O	INDIKATOR KINERJA	Perbandingan Realisasi Tahun 2024			
		Target Kota Pematangsiantar	Kota Pematangsiantar	Provinsi Sumatera Utara	Nasional
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (>50-60)	B (64,5)	B (80,89)	-
2.	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>55-60)	B (60,84)	B (68,93)	-
3.	Nilai LPPD	Tinggi (3,61-3,80)	Belum Rilis	Belum Rilis	-
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Baik (70,00)	Baik (77,01)	Cukup (66,66)	-
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78-80)	B (89,1)	-	-
6.	Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 Inovasi	-	-

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Kota Pematangsiantar Tahun 2024 memiliki realisasi yang signifikan dengan realisasi Provinsi Sumatera Utara. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja tidak ada yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Nasional.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar telah mencapai target seperti yang dinyatakan pada Perjanjian Kinerja tersebut. Keberhasilan dan kegagalan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

Indikator Kinerja	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan	Solusi
Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya anggaran yang memadai- Sarana parasana kantor yang memadai- SDM yang berkompetensi	-	-
Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar			
Nilai LPPD			
Indeks Kepuasan Masyarakat			
Inovasi Perangkat Daerah			
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	Kurangnya SDM dalam bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none">- Perekrutan SDM yang sesuai dengan kebutuhan bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa- Pelaksanaan Bimbingan Teknis atau Diklat Khusus bidang tata Kelola pengadaan barang dan jasa

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan adanya Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada serta dibarengi dengan anggaran yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar maka ini adalah salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan kinerja yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

Tabel 3.1.5
Realisasi Program Per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.166.308.296,00	Rp.161.819.552,00	97%
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	Kegiatan Penataan Organisasi			
		Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.1.494.615.273,00	Rp.1.461.665.584,00	97%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.1.033.268.418,00	Rp.908.435.127,00	88%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.48.652.772.081,00	Rp.47.195.396.004,00	97%
		Inovasi	Kegiatan Penataan			

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

		Perangkat Daerah	<p>Organisasi</p> <p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p>			
--	--	------------------	--	--	--	--

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

			<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH</p> <p>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</p> <p>Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

			Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.1.5.1
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	100%	Rp.166.308.296,00	Rp.161.819.552,00	97%
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	B	B	100%			
		Nilai LPPD	Tinggi	Belum Rilis	n/a	Rp.1.494.615.273,00	Rp.1.461.665.584,00	97%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Baik	Baik	97%	Rp.1.033.268.418,00	Rp.908.435.127,00	88%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89.1	100%	Rp.48.652.772.081,00	Rp.47.195.396.004,00	97%
		Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 inovasi	100%			

Tabel 3.5.1.2
Efisiensi Per Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	97%	3%
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	100%		
		Nilai LPPD	n/a	97%	n/a
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	97%	88%	9%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	97%	3%
		Inovasi Perangkat Daerah	100%		3%

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sesuai dengan Dokumen Perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, maka Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar melaksanakan 3 (tiga) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan yaitu :

Program/ Kegiatan	Keberhasilan	Kegagalan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota. 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; 10. Penataan Organisasi; 11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya anggaran yang memadai- Sarana parasana kantor yang memadai- SDM yang berkompetensi	

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Administrasi Tata Pemerintahan; 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah.	- Tersedianya anggaran yang memadai - Sarana parasana kantor yang memadai - SDM yang berkompetensi	
Program Perekonomian dan Pembangunan. 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Kurangnya SDM dalam bidang tata kelola pengadaan barang dan jasa

Dalam menjalankan program dan kegiatan di atas, Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar diberikan Anggaran sebesar Rp. 45.355.708.829,00 namun ada penambahan sebesar Rp. 5.991.255.239,00 menjadi Rp. 51.346.964.068,00 pada perubahan APBD dengan adanya penambahan anggaran tersebut pelaksanaan kinerja di Sekretariat Daerah Kota telah berjalan dengan baik.

3.2 Realisasi Anggaran

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% Realisasi
1	Bagian Umum	36.808.177.100	35.666.469.048	1.141.708.052	96,90%
2	Bagian Pemerintahan	1.731.606.713	1.697.443.368	34.163.345	98,03%
3	Bagian Organisasi	392.960.965	384.724.721	8.236.244	97,90%
4	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	793.723.587	759.808.905	33.914.682	95,73%
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.053.587.864	8.818.787.124	234.800.740	97,41%
6	Bagian Hukum	898.792.966	881.166.897	17.626.069	98,04%
7	Bagian Perekonomian dan SDA	547.311.023	530.591.823	16.719.200	96,95%
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.033.268.418	908.435.127	124.833.291	87,92%
9	Bagian Administrasi Pembangunan	435.104.916	399.487.655	35.617.261	91,81%
TOTAL		51.694.533.552	50.046.914.668	1.647.618.884	96,81%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa beberapa Unit Kerja Bagian memiliki persentase realisasi anggaran yang masih rendah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran, antara lain:

1. Perbedaan harga antara Satuan Standar Harga dengan harga di lapangan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam alokasi anggaran.
2. Perubahan regulasi yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Penataan standar administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berdampak pada keterlambatan eksekusi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang pengelolaan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kota Pematangsiantar yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini karena dukungan dan keseriusan seluruh Aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab, maupun seluruh stakeholders yang ada di Kota Pematangsiantar.

Namun, ada beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah antara lain:

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja dari setiap Unit Kerja Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran dari setiap Unit Kerja Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

Dengan menerapkan Langkah- Langkah ini, LAKIP dapat menjadi lebih akurat dan bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas.

Penyampaian Laporan Kinerja ini sebagai pemenuhan peraturan perundang-undangan juga sebagai evaluasi bagi Instansi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dalam menilai kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhitungkan masalah maupun hambatan yang dihadapi, sehingga pada tahun

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2024

mendatang kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Pematangsiantar, Maret 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR

HUNALDA A. SITANGGANG